

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KEEROM

Gratiana Deodata H.D.P¹, Taufik Rachman²

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Jl. Raya Sentani – Padang Bulan, Jayapura 99351

Gratiana.deodata@gmail.com¹, taufik9899@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung potensi menurut jenis PAD, menganalisis kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan survei lapangan sedangkan data sekunder menggunakan data APBD dari tahun 2015-2018. Menggunakan analisis rasio untuk menganalisa potensi Pajak, dan kemampuan keuangan daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa potensi PAD berdasarkan matrik dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu kelompok prima 5 (lima) jenis PAD, kelompok potensial 4 (empat) jenis PAD, kelompok berkembang 5 (lima) jenis PAD, sedangkan kelompok terbelakang yaitu 16 (enam belas) jenis PAD. Dari hasil perhitungan kontribusi pajak daerah dalam 4 tahun terakhir menunjukkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah masuk dalam kategori baik (rata-rata dalam empat tahun terakhir adalah 42,38%). Ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Keerom tetap berusaha optimal dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan terutama pajak daerah. Sedangkan hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah selama 4 tahun terakhir adalah sangat kurang (rata-rata kontribusi selama 4 tahun adalah 9%).

Kata kunci: Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah

1. PENDAHULUAN

Sejak berdirinya Kabupaten Keerom pada tahun 2002 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, maka pemerintah daerah baru benar-benar mengelola anggaran mulai pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. Sedangkan Tahun Anggaran 2003 masih anggaran transisi (belum mempunyai APBD dan DPRD). Penerimaan Pendapatan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi PAD terhadap penerimaan masih sangat kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang, yang perlu disikapi dengan usaha keras, agar komposisi

perimbangan peran PAD dan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Dari data keuangan tahun 2004 sampai dengan 2009 dapat dikatakan bahwa kemampuan Kabupaten Keerom dalam melaksanakan otonomi daerah masih rendah dari aspek kemampuan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah kepada pemerintah atasan baik pusat maupun provinsi sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk menggali potensi PAD dalam rangka meningkatkan penerimaan asli daerah. Dimana sumber-sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Keerom terdiri dari : Penerimaan dari Pajak Daerah yaitu dari pajak reklame, pajak penerangan jalan umum

dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Penerimaan dari retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan/ persampahan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi pajak, retribusi surat ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin trayek taksi, retribusi ijin tempat usaha, retribusi ijin usaha perdagangan, retribusi tanda daftar perusahaan, retribusi ketatausahaan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah yaitu dari Dividen (Laba) dari Penyertaan Modal pada PT. Bank Papua. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Rendahnya PAD membuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Untuk mengurangi subsidi pemerintah pusat, daerah perlu diberikan otonomi keuangan daerah untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan memanfaatkan secara optimal.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Sumber-sumber pendapatan asli daerah apa saja yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Keerom beserta model pemetaannya dan bagaimanakah kemampuan keuangan daerah Kabupaten Keerom selama otonomi daerah.

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Menganalisis jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah yang memiliki Potensi dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Keerom, serta untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah setelah diberlakukan otonomi daerah di Kabupaten Keerom.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah selain retribusi daerah. Daerah harus memiliki kewenangan dan menggali sumber

keuangan sendiri. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengenakan pemungutan retribusi daerah berdasarkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/kota sebagai titik berat otonomi daerah, dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Otonomi Daerah itu sendiri dapat didefinisikan sebagai wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hakikat Otonomi yaitu adanya hak untuk mengurus dan menjalankan apa yang menjadi wewenangnya, otonomi yang ideal membutuhkan keleluasaan dalam segala hal termasuk pendapatan dan belanja daerah.

Faktor keuangan adalah faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Untuk itu keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam pembangunan dengan konsep otonomi. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

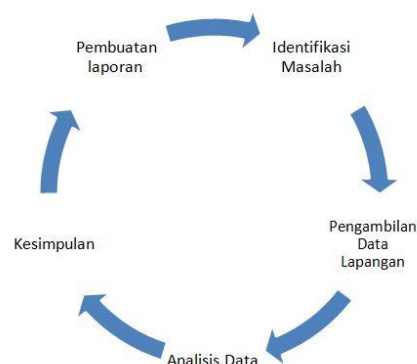
Masalah kemampuan keuangan daerah ini merupakan masalah utama bagi banyak daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, karena luasnya kewenangan yang diemban oleh pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Data yang terkumpul pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap sumber informasi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini sumber informasi dari data primer adalah Kepala Dinas Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mengenai implementasi dan hambatan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Data primer juga didapat dari hasil observasi dan survey terhadap pajak dan retribusi daerah untuk mencari proyeksi atau peramalan potensi pendapatan Asli Daerah.

Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh melalui lembaga atau instansi terkait yang mendukung penelitian ini. Data tersebut antara lain: laporan Pertanggung jawaban Bupati, APBD, Keerom dalam Angka, dan lain-lain dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2012 sampai tahun 2017. Data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian, diperoleh melalui lembaga pemerintah resmi dari berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah antara lain: Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Keerom, Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom, dan Badan perencanaan Daerah Kabupaten Keerom. Pengumpulan Data sekunder melalui metode studi dokumen (*documenter Study*), yaitu data yang diperoleh melalui lembaga atau instansi terkait yang mendukung penelitian ini. Data tersebut antara lain: laporan keuangan, APBD, Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Kabupaten Keerom dan lain-lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio yang terdiri dari analisa potensi Pajak, analisis kemampuan keuangan daerah.



Gambar 1. Bagan Alir

3.1. Identifikasi Masalah

Pada Tahapan ini Ketua dan Anggota mengidentifikasi masalah –masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang potensi penerimaan Daerah di Kabupaten Keerom.

3.2. Pengambilan Data

Pada tahapan ini Ketua bertugas mengambil data di Dinas Pendapatan Daerah dan melakukan wawancara terkait penelitian ini, sedangkan anggota penelitian bertugas mengambil data dilapangan di kawasan Keerom.

3.3. Analisis Data

Pada tahapan ini Ketua dan Anggota melakukan analisis berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan melakukan pemetaan berdasarkan.

3.4. Kesimpulan

Pada tahapan ini Ketua dan Anggota menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan analisis data dan memberikan saran terkait hasil data tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Potensi Menurut Jenis Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil perhitungan berdasarkan rasio kontribusi dan pertumbuhan dari masing-masing jenis PAD maka potensi menurut jenis pendapatan asli daerah di Kabupaten Keerom dapat diidentifikasi berdasarkan matriks dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu PRIMA dimana jenis pendapatan asli daerah digolongkan PRIMA apabila rasio kontribusi ($share$) > 1 (lebih

dari satu) dan rasio pertumbuhan (growth) >1 (lebih dari satu). Sedangkan kelompok POTENSIAL dimana jenis pendapatan asli daerah digolongkan POTENSIAL apabila rasio kontribusi (share) > 1 (lebih dari satu) dan rasio pertumbuhan (growth) <1 (kurang dari satu). Kelompok TERBELAKANG dimana jenis pendapatan asli daerah digolongkan TERBELAKANG apabila rasio kontribusi (share) < 1 (kurang dari satu) dan rasio pertumbuhan (growth) <1 (kurang dari satu).

Tabel 1 : Matriks Potensi Menurut Jenis PAD

PRIMA	BERKEMBANG
1. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan 2. BPHTB 3. Pengembalian Kelebihan Gaji 4. Pengembalian kelebihan belanja 5. Pendapatan Bunga Taspen	1. Retribusi Pelayanan Pasar 2. Retribusi IMB 3. Retribusi Izin Treyek Taxi 4. Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas 5. Deviden
POTENSIAL	TERBELAKANG
1. PBB B2 2. Pajak Penerangan jalan 3. Retribusi RSUD Kwaingga 4. Pengembalian Hasil temuan BPK	1. Pajak Reklame 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 6. Retribusi Sewa Gedung KCP BPD Arso 7. Retribusi Sewa Gedung Pramuka 8. Retribusi Ijin Gangguan 9. BUMD 10. Pelelangan 11. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah 12. Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan 13. Pendapatan dari pengembalian sisa UUDP 14. Pengembalian Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat 15. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 16. Pendapatan JKN(Dana Kapitasi)

Sumber: Pengolahan Data Sekunder (2019)

Berdasarkan perhitungan diatas maka penggolongan jenis-jenis pendapatan asli daerah dapat di lihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1. Jenis pendapatan asli daerah yang termasuk kelompok prima dimana rasio kontribusi (K) >1 dan rasio pertumbuhan (G) >1 yaitu Pajak Mineral bukan logam (rasio K=6,32,rasio G=2,29), BPHTB (rasio K=2,37,rasio G=5,92), Pengembalian kelebihan Gaji dan Tunjangan (rasio K=4,14,rasio G=1,99), Pengembalian Belanja (rasio K=4,28,rasio G=1,99), dan Taspen (rasio K=1,41,rasio G=3,10). Potensi kelompok berkembang dimana rasio kontribusi (K) <1 dan rasio pertumbuhan (G) >1 antara lain Retribusi Pelayanan Pasar (rasio K=0,08,rasio G=8,00), Izin Mendirikan Bangunan (rasio K=0,33,rasio G=1,89), Retribusi Izin Trayek Taxi (rasio K=0,02,rasio G=2,75), dan Jasa Giro Pemegang Kas (rasio K=0,17,rasio G=6,57). Potensi kelompok potensial dimana rasio kontribusi (K) >1 dan rasio pertumbuhan (G) <1 antara lain Pajak Penerangan Jalan (rasio K=1,45, rasio G=0,37), Pajak PBB B2 (rasio K=1,96,rasio G=0,64),

Retribusi Rumah Sakit Kwaingga (rasio K=1,31,rasio G=0,23), Pengembalian Atas tamuan Pemeriksaan BPK (rasio K=2,58,rasio G=-0,71), dan Deviden (rasio K=1,18,rasio G=0,00). Sedangkan potensi kelompok terbelakang yaitu Pajak Reklame (rasio K=0,38, rasio G=0,60), Retribusi Pelayanan Kesehatan (rasio K=0,01, rasio G=0,32), Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (rasio K=0,04, rasio G=-1,11), Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (rasio K=0,0,rasio G=0,0), Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah Sewa alat berat (rasio K=0,12 ,rasio G=-0,50), Retribusi Sewa Gedung BPD Papua (rasio K=0,0, rasio G=0,0), Retribusi Sewa Gedung Pramuka (rasio K=0,20,rasio G=-0,41), Retribusi Izin gangguan (rasio K=0,67,rasio G=-0,50), BUMD (rasio K=0,0,rasio G=0,0), Pelelangan (rasio K=0,0,rasio G=0,0), Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah (rasio K=0,93,rasio G=-0,43), Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan (rasio K=0,03, rasio G=-0,66), Pendapatan dari pengembalian sisa UUDP (rasio K=0,0,rasio G=0,0), Pengembalian Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat (rasio K=0,15,rasio G=0,00), Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin (rasio K=0,00,rasio G=0,00), dan Jaminan Kesehatan (JKN) (rasio K=0,00,rasio G=-1,99).

Pada kolom prima berdasarkan matrik ini memiliki rasio kontribusi lebih dari 1 (satu) dan rasio pertumbuhan lebih dari 1 (satu). Jenis Pendapatan Asli Daerah yang masuk dalam kategori ini salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Hal ini sesuai dengan hasil wawancara baik dengan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun kepala Badan Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih menjadi penerimaan PAD andalan dari Kabupaten Keerom. Begitupula dengan Pajak BPHTP yang baru ditetapkan pada tahun 2011 sejak kabupaten Keerom berdiri menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak BPHTP bisa menjadi unggulan bagi Kabupaten Keerom. Tetapi sangat disayangkan penerimaan yang berasal dari retribusi tidak ada yang masuk kedalam kategori Prima.

Jenis yang termasuk dalam kelompok ini diperlukan strategi dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan antara lain melakukan pengawasan yang lebih baik agar penerimaan yang diperoleh dari kedua pajak diatas tidak mengalami penurunan.

Pada Kolom berkembang berdasarkan matrik ini memiliki rasio kontribusi kurang dari 1 (satu)

dan rasio pertumbuhan lebih dari 1 (satu). Jenis yang termasuk dalam kelompok tersebut dapat dioptimalkan dalam penggaliannya. Jenis PAD yang termasuk kategori ini adalah Retribusi Pelayanan Pasar, Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek Taxi dan Jasa Giro Pemegang Kas.

Walaupun Penerimaan dari retribusi belum masuk kedalam kategori Prima tetapi untuk retribusi Pelayanan Pasar, Izin Mendirikan Bangunan, dan retribusi Izin Trayek Taxi masih dapat dioptimalkan penerimaannya. Dari hasil survei dan wawancara untuk Retribusi Pasar telah dibangun 2 (dua) pasar baru pada tahun 2018 yaitu pasar rakyat dikampung Yowong yang dibangun menggunakan dana APBN dan Pasar Avidjan di Arso Swakarsa yang dibangun menggunakan dana APBD. Kedua pasar ini telah selesai dibangun tetapi belum di gunakan secara maksimal hal ini bisa dilihat dari keadaan kedua pasar yang terbengkalai. Apabila pasar ini telah beroperasi maka potensi penerimaan dari retribusi pasar juga akan semakin meningkat. Begitupula dengan Retribusi Izin Trayek, ditahun 2018 juga telah dibangun terminal yang letaknya dekat dengan pasar Avidjan, tetapi belum dipergunakan, apabila terminal ini dtelah difungsikan maka potensi penerimaan dari retribusi ijin trayek akan meningkat.

Jenis yang termasuk dalam kelompok ini strategi yang diperlukan dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan yaitu:

- a) Mengoptimalkan kedua pasar dan terminal baru.
- b) Melakukan pengawasan yang lebih baik.
- c) Melakukan promosi kepada masyarakat agar mau menempati atau berjualan pada pasar-pasar yang ada.

Pada kolom potensial berdasarkan matrik ini memiliki rasio kontribusi lebih dari 1 (satu) dan rasio pertumbuhan kurang dari 1 (satu). Jenis yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Pajak Penerangan, Pajak PBB B2 Retribusi Rumah Sakit Kwaingga, Pengembalian Atas tamu Pemeriksaan BPK dan Deviden

Jenis yang termasuk dalam kelompok ini strategi yang diperlukan dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan yaitu dengan melakukan pengawasan yang lebih baik.

Pada kolom terbelakang berdasarkan pengelompokan matrik ini memiliki rasio kontribusi kurang dari 1 (satu) dan rasio pertumbuhan kurang dari 1 (satu). Hal ini

menunjukkan bahwa jenis potensi pendapatan asli daerah ini sulit untuk dikembangkan dalam pengoptimalan pendapatan asli daerah.

Jenis yang termasuk dalam kelompok ini strategi yang diperlukan dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan yaitu:

a) Strategi jangka pendek:

- 1) Penjaringan waib pajak dan melakukan interaksi dengan waib pajak,
- 2) Pembinaan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi,
- 3) Melakukan koordinasi antar pihak terkait, baik di dinas maupun lapangan,
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
- 5) Meningkatkan pengawasan atas pengeluaran PAD dengan melakukan ui potensi,
- 6) Melakukan pemeriksaan secara periodik ke lapangan yang dilaksanakan oleh pihak terkait,
- 7) Meningkatkan frekuensi jam kerja pemungutan,
- 8) Memperluas basis penerimaan waib pajak baru, jumlah pembayar pajak,
- 9) Melakukan pperhitungan kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan,
- 10) Memperkuat proses pemungutan yaitu dengan penyusunan perda, meningkatkan sdm dan mengubah tarif,\
- 11) Menerapkan sanksi terhadap pemungutan pajak and pihak fiskus yang melakukan pelanggaran.

b) Strategi jangka panjang:

Penggalian PAD yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat kontribusi menurut jenis pendapatan asli daerah pada tahun 2018 pendapatan asli daerah tertinggi berasal dari Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 21,08% sedangkan terendah dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar 0,04%. Adapun rata-rata kontribusi menurut jenis pendapatan asli daerah pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,33%.

Pertumbuhan menurut jenis pendapatan asli daerah pada tahun 2018 tertinggi berasal dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar 4,24% sedangkan terendah dari retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar minus 0,56%.

Adapun rata-rata pertumbuhan pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,50%.

Hasil perhitungan potensi jenis PAD tidak sama dengan hipotesis dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan perkiraan hanya 2 jenis pajak daerah dan tidak ada salah satu jenis retribusi yang masuk dalam kategori Prima.

4.2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

4.2.1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total pendapatan asli daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap PAD. Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula tingkat kontribusi pajak tersebut semakin besar. Rumusnya sebagai berikut:

$$C_j = \frac{SPjD_t}{PAD_t} \times 100\%$$

C_j : kontribusi variabel pajak daerah terhadap PAD.

$SPjD_t$: nilai dari realisasi pendapatan daerah tahun t.

PAD_t : realisasi total pendapatan asli daerah tahun t.

$$C = \frac{TPjD_t}{TPAD_t} \times 100\%$$

C : kontribusi total pajak daerah terhadap PAD.

$TPjD_t$: nilai dari realisasi total pajak daerah tahun t.

$TPAD_t$: total realisasi pendapatan asli daerah tahun t.

Tabel 2 : Kinerja Kontribusi Daerah Terhadap PAD

Rasio kontribusi	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
00,00% - 10,00%	Sangat kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Baik
> 50,01%	Sangat baik

Sumber : R. Agoes Kamarullah (2017)

Setelah dilakukan analisis maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3 : Kontribusi Variabel Pajak Terhadap PAD

Tahun	Jenis Pajak					Total PAD	Kontribusi variabel Pajak				
	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	PBB B2	BPHTB		Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	PBB B2	BPHTB
2015	180.550.545	500.880.240	536.738.670	637.586.751	425.165.541	12.476.128.572	1,47%	4,01%	7,51%	5,11%	3,39%
2016	227.552.000	602.289.853	6.851.482.862	736.553.670	40.240.546.700	63.814.379.210	0,36%	0,94%	9,48%	1,15%	63,06%
2017	199.025.800	754.483.558	1.510.285.987	992.280.387	380.724.535	13.517.754.368	1,47%	5,58%	14,13%	7,12%	2,86%
2018	246.887.500	544.346.734	4.108.712.527	1.272.041.371	1.538.691.650	19.490.489.557	1,26%	4,85%	21,08%	6,53%	7,88%

Tabel 4 : Kemampuan Daerah Berdasarkan Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Total Pajak	Total Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kemampuan
2015	2.681.316.851	12.476.128.572	21,49%	Sedang
2016	47.860.445.095	63.814.379.210	75,00%	Sangat Baik
2017	4.244.811.637	13.517.754.368	31,40%	Cukup
2018	8.112.670.182	19.490.489.557	41,62%	Baik
Rata-Rata			42,38%	Baik

Sumber : Pengolahan data sekunder (2019)

Dari kedua tabel diatas, Kontribusi pajak setiap tahun sejak T.A. 2015 hingga T.A. 2019 selalu mengalami fluktuasi.

Tahun 2015, pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan kontribusi terbesar sebesar 7,51%, Pajak BPP B2 memberikan sebesar 5,11%, pajak penerangan jalan memberikan sumbangan sebesar 4,01%. Pajak BPHTB sebesar 3,39% dan pajak reklame menyumbang PAD sebesar 1,47%

Tahun 2016, Pajak BPHTB memberikan kontribusi terbesar sebesar 63,06%. pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan kontribusi terbesar sebesar 9,48%, Pajak BPP B2 memberikan sebesar 1,15%, Pajak penerangan jalan memberikan sumbangan sebesar 0,94% dan pajak reklame menyumbang PAD sebesar 0,36%. Dari hasil wawancara pada tahun 2016 terjadi peningkatan penerimaan pajak BPHTB dikarenakan ada penerimaan pembayaran atas tunggakan dari perusahaan Sawit Jaya, Sehingga Pada tahun 2016 penerimaan PAD dari pajak daerah meningkat tajam.

Tahun 2017, pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan kontribusi terbesar sebesar 14,13%, Pajak BPP B2 memberikan sebesar

7,12% ,Pajak penerangan jalan memberikan sumbangan sebesar 5,88%, Pajak BPHTB sebesar 2,86%. Dan pajak reklame menyumbang PAD sebesar 1,41%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pendapatan pajak yang sangat drastis dikarenakan penerimaan pajak BPHTP telah kembali diangka normal karena tidak ada pembayaran tunggakan.

Tahun. 2018, pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan kontribusi terbesar sebesar 21,08%, Pajak BPHTB sebesar 7,89%, Pajak BPP B2 memberikan sebesar 6,53%, Pajak penerangan jalan memberikan sumbangan sebesar 4,85%., dan pajak reklame menyumbang PAD sebesar 1,28%.

Dari hasil perhitungan kontribusi total pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2015 adalah sebesar 21,49, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD adalah Kurang, pada tahun 2016 kontribusi total pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 75%, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah Sangat Baik, pada tahun 2017 kontribusi total pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 31,40%, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah Cukup. Sedangkan pada tahun 2018 kontribusi total pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 41,62%, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah Baik.

Dalam 4 tahun terakhir Penilaian Kinerja Keuangan menunjukkan kontribusi penerimaan yang berasal dari pajak daerah adalah Baik (Rata-rata kontribusi selama 4 tahun adalah 42,38%). Ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Keerom tetap berusaha optimal dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan terutama pajak daerah.

4.2.2. Kontribusi Retribusi daerah terhadap PAD.

Kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis retribusi tertentu dengan total pendapatan asli daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis retribusi daerah terhadap PAD. Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula tingkat kontribusi retribusi tersebut semakin besar

Tabel 5 : Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap PAD

Tahun	Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Total PAD					
	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi RSUD Kwaingga	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran
2015	0,07%	0,00%	6,07%	0,00%	2,60%	0,43%
2016	0,03%	0,03%	0,94%	0,10%	0,00%	0,00%
2017	0,07%	0,05%	5,64%	0,44%	0,00%	0,00%
2018	0,25%	0,04%	4,37%	0,13%	0,00%	0,00%

Tabel 6 : Kontribusi Retribusi Jasa Usaha Terhadap Total PAD

Tahun	Kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap Total PAD		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat Dinas PU)	Retribusi Sewa Gedung Papua	Retribusi Sewa Gedung Pramuka
2015	1,16%	0,00%	0%
2016	0,28%	0,12%	0%
2017	0,54%	0,74%	0%
2018	0,36%	0,38%	0%

Tabel 7 : Kemampuan Daerah Berdasarkan Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah	Total Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kemampuan
2015	1.426.098.004	12.476.128.572	11%	Sangat Kurang
2016	1.306.662.000	63.814.379.210	2%	Sangat Kurang
2017	1.738.681.350	13.517.754.368	13%	Sangat Kurang
2018	1.712.397.800	19.490.489.557	9%	Sangat Kurang
RATA-RATA			9%	Sangat Kurang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 penerimaan retribusi terbesar berasal dari Retribusi Rumah Sakit Kwaingga, sedangkan untuk penerimaan retribusi lain masih berfluktuasi naik dan turun setiap tahunnya.

Dalam 4 tahun terakhir Penilaian Kinerja Keuangan menunjukkan kontribusi penerimaan yang berasal dari retribusi daerah sudah Sangat Kurang (Rata-rata kontribusi selama 4 tahun adalah 9%). Ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Keerom belum berusaha optimal dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan Retribusi Daerah. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa ada beberapa jenis retribusi yang dulunya ada tetapi sekarang tidak dipunggut lagi, salah satunya adalah retribusi KTP dan catatan sipil, Retribusi SITU,SIUP,SIUK dan TDP serta retribusi persampahan. Sedangkan untuk retribusi

Pengendalian Menara telekomunikasi belum ada peraturan daerah yang mengaturnya sehingga retribusi yang diterima hanya pada tahun 2015 ketika pertama kali menara telekomunikasi dibangun. Padahal bila dibandingkan dengan kota Jayapura, setiap tahun kota Jayapura mendapatkan penerimaan retribusi dari pengendalian menara telekomunikasi dengan menengirimkan surat tagihan kepada provider atau pemilik menara tersebut. Hal ini bisa menjadi contoh oleh Dinas pendapatan daerah agar mengambil tindakan yang sama sehingga penerimaan yang berasal dari menara telekomunikasi dapat rutin diterima setiap tahunnya.

4.3. Pajak Daerah yang Berpotensi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Pajak daerah yang memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan daerah adalah pajak rumah makan atau restaurant. Dari data Lapangan diperoleh ada sekitar 119 rumah makan baik kecil maupun besar, dimana dari awal berdirinya Kabupaten Keerom belum ada kebijakan terkait pajak rumah makan, sehingga apabila pemerintah menerbitkan perda terkait pajak rumah makan maka penerimaan daerah yang berasal dari pajak akan bertambah.

Perhitungan potensi penerimaan Pajak Rumah Makan sebagai berikut:

Hasil Pengumpulan Data:

- a). Jumlah restoran adalah 119
- b). Rata-rata pengunjung perhari 35 orang
- c). Dana yang dikeluarkan setiap pengunjung Rp 30.000,00

Perhitungan:

- a). Pendapatan restoran/tahun
 $= (119 \times 35 \times \text{Rp } 30.000,00) \times 288 \text{ hari}$
 $= \text{Rp. } 35.985.600.000$
- b). Pendapatan pajak/tahun
 $= \text{Rp. } 35.985.600.000,00 \times 10\%$
 $= \text{Rp } 3.598.560.000,00$

Jadi potensi pajak restoran pertahun adalah Rp 3.598.560.000,00

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan dari pajak rumah makan adalah sebesar **Rp 3.598.560.000,00.**

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis Pendapatan Asli Daerah yang masuk dalam kategori prima adalah Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, BPHTB, Pengembalian Kelebihan Gaji, Pengembalian kelebihan belanja dan Pendapatan Bunga Taspen. Jenis Pendapatan Asli Daerah yang masuk dalam kategori berkembang adalah Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi IMB, Retribusi izin Treyek Taxi, Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas, dan Deviden. Jenis Pendapatan Asli Daerah yang masuk dalam kategori Potensial adalah PBB B2, Pajak Penerangan jalan, Retribusi RSUD Kwaingga, dan Pengembalian Hasil temuan BPK. Sedangkan Jenis Pendapatan Asli Daerah yang masuk dalam kategori Terbelakang adalah Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Sewa Gedung KCP BPD Arso, Retribusi Sewa Gedung Pramuka, Retribusi Ijin Gangguan, BUMD, Pelelangan, Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah, Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan, Pendapatan dari pengembalian sisa UUDP, Pengembalian Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat, Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan JKN(Dana Kapitasi).
2. Dari hasil perhitungan kontribusi pajak daerah dalam 4 tahun terakhir menunjukkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah masuk dalam kategori baik (rata-rata dalam empat tahun terakhir adalah 42,38%. Ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Keerom tetap berusaha optimal dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan terutama pajak daerah. Sedangkan hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah selama 4 tahun terakhir adalah sangat kurang (rata-rata kontribusi selama 4 tahun adalah 9%).

5.2. Saran

Setelah melihat hasil analisis data dan kesimpulan di muka, maka terdapat beberapa saran antara lain :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Keerom memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat/provinsi, yang di sebabkan belum optimalnya penerimaan dari PAD. Pemerintah Kabupaten perlu meningkatkan sumber daya dan potensi daerahnya serta penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga ketergantungannya terhadap dana eksternal dapat berkurang dan lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya.
2. Hasil analisis menunjukan bahwa penerimaan daerah dari pajak daerah sangat kurang dan hanya 3 obyek yang baru dilakukan pungutan. Hal ini terjadi karena belum adanya kebijakan perda yang mengatur pajak dan retribusi, sampai saat ini Perda yang mengatur pajak dan retribusi baru 10 Peraturan Daerah yang berlaku. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi perlu didukung oleh peraturan daerah agar bias dilakukan pemungutan sehingga pajak yang memiliki potensi tetapi belum ter gali dapat dilakukan pungutan sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan PAD.
3. Jenis PAD yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak restaurant karena sampai saat ini belum dilakukan pemungutan atas pajak ini, sedangkan untuk retribusi yang memiliki potensi adalah izin mendirikan bangunan karena dari data yang didapat masih sebagian besar penduduk Kabupaten Keerom masih belum memiliki izin mendirikan bangunan, sehingga apabila pemerintah berupaya keras dalam melakukan pungutan atas retribusi izin mendirikan bangunan maka akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah.
4. Sumber penerimaan menurut jenis pendapatan asli daerah di Kabupaten Keerom perlu adanya pengadministrasian data mulai dari perhitungan, pencatatan, pelaporan dan penyimpanan menurut jenis pendapatan asli daerah. Dengan tersedianya data, maka potensi jenis pendapatan asli daerah dapat dihitung dan dikelompokkan berdasarkan matriks potensi pendapatan asli daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

Andreas Suryo Adi, Firma Sulistiyowati, 2010, *Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010*, Jurnal Ekonomi Unoversitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Kabupaten Keerom, 2018, *Keerom Dalam Angka Tahun 2018*, Badan Pusat Statistik

Mohammad Sholahuddin Yusuf, Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai, 2014, *Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik)*, Jurnal

Patriantio, Eko , 2017, *Analisis Efektifitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004

Wardoyo Aditya, Yulia Indrawari, Ciplis Gema Qori'ah, 2012, *Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*, Undip.